



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Rizki Ananda Zuhri Saragih, (2018): *Pemberian Grasi kepada Terpidana Mati Kasus Narkotika dalam Perspektif Fiqih Siyasah.***

Presiden berhak menerima dan menolak dengan bijak dan teliti tentang pengajuan grasi terhadap pidana kasus narkotika yang telah memperoleh putusan tetap dari pengadilan dalam semua tingkatan dengan kualifikasi hukuman mati. Grasi diatur didalam undang-undang pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Artinya grasi memiliki batasan-batasan sempit karena harus mempertimbangkan Mahkamah Agung untuk kepentingan umum yakni kebaikan publik dan keamanan negara. Sanksi pidana narkotika tertuang didalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu seberat-beratnya hukuman mati.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat dua pokok permasalahan, yakni bagaimanakah pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkotika berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia?, dan bagaimanakah tinjauan Fiqih Siyasah tentang pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkotika?

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni membahas tentang pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkotika berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pengampunan oleh Presiden kepada narapidana. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis : Sumber data :Data primer, yakni, UUD 1945, data skunder: buku-buku yang memuat teori-toeri yang berhubungan dengan penelitian ini dan data tersier dari kamus, jurnal, majalah dan internet.

Pemberian grasi kepada pidana narkotika dengan dijatuhi hukuman mati tidak banyak dijelaskan didalam nash al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Arti dari grasi dalam hukum islam yaitu al-Afwa dan al-Syafa'at, berarti ampunan yang diberikan Allah SWT kepada seseorang yang melanggar hukum syariat dengan batasan- batasan tertentu. Status keharaman narkotika banyak dijelaskan oleh para fuqaha (ahli fiqih) bahwa sandaran keharaman narkotika adalah khamar yang bersifat memabukkan dan menghilangkan akal seseorang. Sanksi kepada pidana narkotika cukup berat yaitu dijatuhi hukuman ta'zir karena efek penggunaannya dapat merusak seseorang, bahkan dapat merusak generasi bangsa dan stabilitas keamanan negara. Maka dengan itulah pihak penguasa dapat memberikan sanksi ta'zir dengan evaluasi hukuman yang seberat-beratnya.